

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN WISATA DANAU TANGKAS DI DESA
TANJUNG LANJUT KABUPATEN MUARO JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
Dalam Ilmu Pemerintahan



Oleh :
ANI JULIA SAFITRI
NIM: 105170394

Pembimbing:
Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H
Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 1443/ 2021 M**

@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan menyatakan bahwa:

Skripsi ini ialah hasil dari karya asli saya yang diajukan sehingga terpenuhinya persyaratan untuk memperoleh gelar strata I (S.I) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi.

Jika dikemudian hari nanti terbukti bahwa ini bukan dari hasil karya saya dan merupakan hasil dari contekan dari karya orang lain, maka saya akan siap menerima sanksi dan hukuman yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Maret 2021



Ani Julia Safitri
NIM: 105170394

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,MH
Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi-Muaro Bulian
K.M 16 Simpang. Sungai Duren, Kab. Muaro Jambi
31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2021

Kepada YTH,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudari Ani Julia Safitri Nim: 105170394 yang berjudul "**Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muara Jambi**". Telah dapat untuk diajukan ujian munaqasah untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (SI) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini saya mengajukan skripsi tersebut agar bisa di terima dengan baik.

Demikianlah, saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat dan berguna untuk kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Dosen Pembimbing I

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H
NIP: 196509292005011002

Dosen Pembimbing II

Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H
NIP: 199204052018011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B- /D.II/PP. /05/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Ani Julia Safitri
NIM : 105170394
Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Mei 2021
Nilai Munaqasyah : 82.6 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Siti Marlina, S.A., M.HI

NIP. 19750221 200701 2 015

Penguji I

Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI
NIP. 19711220 199203 2 001

Penguji II

Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP
NIP. 19710706 200710 2 001

Pembimbing I

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
NIP. 19650929 200501 1 002

Pembimbing II

Tasnudin Fitrah, S.Sy., M.H
NIP. 19920405 201801 1 003

Sekretaris Sidang

Drs. A. Asnawi US
NIP. 19631111 199201 1 001

Jambi, Mei 2021

Fakultas Syariah
UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN

UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi
NIP. 19720102 200003 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthra Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthra Jambi

MOTTO

وَتَعَا وَ نُوعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَ نُوعَا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksan- Nya (Qs: Al- Maidah: 2).

PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada allah SWT. Terimakasih kasih telah memberikan kekuatan, membekali kudengan ilmu serta mempermudah langkahku . Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan untuk nabi muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat kumuliakan Bapak Anwar Fauzi Dan Ibu Sawiatun tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ku ini untuk bapak dan ibu yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang tiada mungkin dapat kubalas.

Kepada adikku Arianti, Ana Usnul dan M. Hillal dan keluarga besarku Terima kasih kepada kalian yang telah mendo'akanku dan memberikan semangat kepadaku dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H dan Bapak Tasnim Rahman Fitra , S.Sy.,M.H yang telah membimbing saya selama penyelesaian tugas akhir ini. Saya ucapkan terimakasih banyak atas ilmu, nasehat, saran yang telah bapak berikan kepada saya.

Taklupa, kepada teman-temanku, Masa Halinur, Calon Mantu Squad, Keluarga IP C, dan teman seperjuangan angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan,kepadaku hingga akhirnya penulisan skripsi ini selesai

ABSTRAK

Nama : Ani Julia Safitri

Nim : 105170394

Judul : Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi, serta bagaimana kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata dan kendala yang dihadapi Pemerintah dan masyarakat dalam pengeolaan wisata Danau Tangkas. Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa *pertama*, sistem pengelolaan wisata Danau Tangkas dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa Yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa Tanjung Jaya Mandiri, sistem pengelolaannya dilakukan dengan penyusunan manajemen perencanaan, pengorganisasian pengelola wisata, pengawasan dan koordinasi dengan melibatkan masyarakat didalamnya. *Kedua* kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas adalah masyarakat diikut sertakan dalam keanggotaan BUMDes untuk mengelola objek wisata serta menjalin kemitraan dan kerjasama investasi. *Ketiga*, kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Tanjung Lanjut adalah masalah sumber daya manusia, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjalin kemitraan, kurangnya modal, kendala dengan masyarakat mengenai lahan parkir, selain itu adanya kendala terkait infrastruktur jalan menuju desa Tanjung Lanjut dan objek wisata Danau Tangkas.

Kata kunci: *Pemerintah Desa, Kemitraan, Pengelolaan wisata*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi ini penulis beri judul **“Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi.”**

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan-masukan maupun arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama dari Dosen Pembimbing. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis merasa bersyukur kehadirat Allah SWT dan mengucapkan terimakasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H. Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th,I., MA., M.IR.,Ph.D wakil Dekan bidang akademik. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,M.H. wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan. Dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH.,M.Hum wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerja sama dilingkungan fakultas syari’an UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.IP selaku ketua jurusan ilmu pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum selaku sekretaris jurusan ilmu pemerintahan fakultas syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu karyawan/ti dilingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak Ibu pimpinan perpustakaan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta stafnya.
9. Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Tanjung Jaya Mandiri.

Akhirnya, semoga Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan dan amal semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jambi, Maret,2021
Penulis



Ani Julia Safitri
105170394

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Tinjauan Pustaka	21
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Jenis dan Sumber Data.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Tempat Penelitian.....	27
D. Instrumen Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	29
F. Sistematika Penelitian	30
G. Jadwal Penelitian.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tanjung Lanjut	33
B. Geografis Desa Tanjung Lanjut	36
C. Demografi Desa Tanjung Lanjut.....	38
D. Visi dan Misi Desa Tanjung Lanjut	40
E. Wisata Danau Tangkas.....	43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pengelolaan Wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi.....	46
B. Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas	59
C. Kendala Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
---------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****CURICULUM VITAE**

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Lanjut.....	42
Gambar 2. Struktur Pengelola Wisata Danau Tangkas	51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Wisata Danau Tangkas.....	7
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 3. Luas Dusun Desa Tanjung Lanjut.....	37
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Lanjut.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor yang potensial dan dipandang memiliki prospek yang cerah dalam pembangunan di Indonesia adalah Sektor Pariwisata. Sektor ini dapat memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing yang dapat menjadi nilai jual yang tinggi khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, membagi fungsi Pemerintah menjadi empat bagian yaitu melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan.¹ Pada fungsi pembangunan, Pemerintah diharapkan mampu mensejahterakan rakyatnya melalui pembangunan fisik maupun non-fisik dengan sasaran-sasaran yang jelas di segala aspek kehidupan masyarakat.

¹Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 34

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai landasan sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, maka setiap daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengurus dan megatur daerahnya sendiri.² Hal ini juga merupakan langkah awal yang sangat strategis bagi daerah untuk menggali, mengembangkan, mengelola aset-aset maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk membangun daerah setempat, termasuk mengamati sektor-sektor strategis seperti sumber daya yang potensial yang dapat dimanfaatkan secara maksimal guna menunjang pembangunan daerah, di mana salah satunya termasuk sektor pariwisata.

Kaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepariwisataan daerah, dimana pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung memberi, menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga mambawa dampak terhadap masyarakat setempat.³ Pariwisata juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Selain itu industri pariwisata tidak hanya terkait pada atraksi wisata, tetapi juga terkait dengan industri lain, seperti perhotelan, restoran, angkutan (darat, laut, dan udara) dan produk-produk industri lainnya. Perkembangan pariwisata ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terusdipacu dan Pemerintah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat

²Undang-undang No. 32 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*,

³ Gde Pita dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.109.



menjadisektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi tumpuan Pemerintah dalam menunjang penerimaan negara⁴

Secara luas pariwisata dapat dilihat sebagai kegiatan mengembangkan potensi objek dan daya wisata serta kawasan-kawasan wisata potensial secara berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian proses pembangunan. Pariwisata juga berperan dalam mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam dan budaya daerah yang sangat khas dan menarik. Oleh karena itu pembangunan industri pariwisata tidak dapat diarahkan untuk pembangunan ekonomi atau budaya saja tetapi untuk melestarikan budaya dan alam.⁵

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (*leading sector*) merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan devisa dan diharapkan dapat memperluas serta meratakan kesempatan berusaha, meluas lapangan kerja dan memupuk rasa cinta tanah air. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari integral pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga kunci *stake holder* yakni Pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.⁶

⁴Endang Tjitroesmi, *Peran Industri Kepariwisata dalam Perekonomian Nasional dan Daerah* P2E-LIPI, Jakarta, 2003, hlm. 105.

⁵ Monawati, *Penataan dan Pengembangan Objek Wisata Pantai Perumahan Indah di Kabupaten Tegal*, Undip, Semarang, 2000, hlm.1.

⁶Hidayat S, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Prilaku Elit Lokal*, tulisan dalam Buku "Indonesia Menapak Abad 21", Kajian Ekonomi Politik, Mellennium Publisher, 2000, hlm 79.



Penyelenggaraan kepariwisataan, pada hakekatnya dilakukan atas berdasarkan beberapa hal yang menjadi motivasi serta kebutuhan setiap orang yang melakukan perjalanan, baik untuk keperluan keluarga, bisnis, pesiar, kesehatan, keagamaan, konferensi, pertandingan olahraga, pendidikan, atau apapun yang lainnya. Dalam kepariwisataan disebut sebagai daya tarik (*attraction*) yang berkaitan dengan unsur alam dan budaya serta kegiatan hidup lainnya, yang penyelenggaraannya melibatkan masyarakat di tempat tujuan tersebut.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian, dan mutu lingkungan hidup dan kepentingan nasional. Pariwisata sebagai salah satu kegiatan pembangunan diupayakan dapat sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan perlu menerapkan kaidah-kaidah :

1. Pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh (holistic) tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan objek dan daya tarik wisata yang memberikan manfaat secara adil bagi semua.
2. Pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, kontak social dan dinamika budaya.



3. Penciptaan keselarasan sinergi antara kebutuhan wisatawan dan penyediaan oleh masyarakat lokal, yang memunculkan hubungan timbal balik dan saling menghargai, nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan budaya.
4. Pemanfaatan sumberdaya pariwisata yang memperhitungkan kemampuan lestariannya yang pengelolaannya secara *eco-effectivity* (*reduce, reuse, dan recycle*) sehingga mencapai *eco-effectivity (redistribute, reactual)*.
5. Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi permintaan (pasar) dan penawaran (produk).

Nampak jelas bahwa pembangunan dibidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Pariwisata memang merupakan sektor yang multidimensi. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam upaya membangun dan mengembangkan serta pengelolaan Kepawisataan di suatu daerah, bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah saja tetapi menjadi tanggungjawab seluruh Stakeholders yang ada dalam pengelolannya. Dalam konsep manajemen kepariwisataan, ada tiga pilar yang menjadi motor penggerak dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan, yaitu Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat. Kesinergisan peran antara ketiga *Stakeholders* tersebut sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan konsep *Good Governance*, yang mana dalam tata kelola Pemerintah yang baik, penyelenggaraan fungsi Pemerintah tertentu tidak lagi di dominasi oleh satu pihak (Pemerintah). Tetapi juga melibatkan

⁷Waluyo & Harry. *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi*. Dekdipbud, Jakarta 1993



adanya kemitraan atau kerjasama yang baik antar elemen yang ada, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah bila melaksanakan pembangunan secara sepihak. Sebagai stakeholder dalam pengembangan industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya sektor pengembangan pariwisata. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan kerjasama atau kemitraan melalui pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada yang terdiri dari Pemerintah, swasta, dan masyarakat dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata di daerah.

Salah satu pariwisata yang menarik untuk dikaji terkait dengan pengelolaan pariwisata adalah wisata Alam Danau Tangkas merupakan salah satu kawasan objek wisata baru yang berada di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Wisata Alam Danau Tangkas ini menawarkan keindahan danau seluas ±250 Hektar, danau ini menawarkan keindahan danau yang di atasnya ditumbuhi banyak pohon putat. Danau ini juga menawarkan permainan air lainnya. Data pengunjung pada tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa masih kurangnya wisatawan yang berkunjung di wisata danau tangkas. Berikut data jumlah pengunjung dari tahun 2018 sampai 2019 dalam tabel dibawah ini :

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 1

Jumlah pengunjung Danau Tangkas pada tahun 2018 sampai 2019⁸

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	September – Desember 2018	570 Orang
2	Januari – Desember 2019	7.453 Orang

Danau ini dikelola oleh Pemerintah Desa Tanjung Lanjut, untuk itu Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata agar banyak dikunjungi wisatawan serta menjadikan daya tarik bagi pengunjung. Dalam wisata ini jika semua stekholder yaitu khususnya Pemerintah Desa dan masyarakat berperan aktif dan dapat menjalin kerjasama dalam pengelolaannya, maka akan berdampak pada perkembangan yang pesat di wisata alam Danau Tangkas. Permasalahanyang dihadapi antara pihak Pemerintah Desadalam proses menjalin kemitraan masih rendahnya partisipasi masyarakat sekitar untuk melakukan kemitraan atau kerjasama dalam program pengembangan dan pengelolaan pariwisata, padahal dengan pengembangan pariwisata ini dapat bermanfaat terhadap peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat itu sendiri.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa dalam hal destinasi wisata berkelanjutan masyarakat mesti berperan aktif dalam pengembangan dan

⁸Wawancara dengan bapak Japar, Manager Wisata Danau Tangkas, 20 Januari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

pengelolaan wisata⁹. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 bahwa kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah , Pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan¹⁰. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sebuah kerjasama atau dikenal dengan *collaborative governance* antara Pemerintah yang terkait terkhususnya Pemerintah Desa Tanjung Lanjut tersebut dengan masyarakat setempat agar dapat memperbanyak variasi produk baru berbasis sumber daya alam, dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, hal ini merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional dengan daerah lain.

Namun dalam asil wawancara awal penulis dengan pengelola mendapatkan hasil bawaha sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Jafar (pengelola wisata Danau Tangkas) yaitu

“Pengelolaan wisata Danau Tangkas ini dalam pengelolaannya pariwisata Danau Tangkas tidak lagi melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, semua dikelola oleh pemerinta Desa dan Badan usaha Milik Desa.”¹¹

⁹Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional*

¹¹Wawancara dengan Bapak Jafar pengelola wisata danau tangkas, januari 2019



Realitas dan penjelasan di atas, memunculkan pertanyaan bagaimana kemitraan yang dilakukan oleh para stakeholders yaitu Pemerintah dan Masyarakat yang ada di Desa Tanjung Lanjut, dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas. Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian terkait wisata Danau Tangkas perlu diperdalam melalui penelitian yang berjudul **“Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian pada latar belakang penelitian di atas penulis menarik rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas?
3. Apa kendala dari Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka bahasan yang menjadi tumpuan utama dari karya ilmiah ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan, baik terhadap penulis maupun pembaca, maka dalam penulisan ini hanya memfokuskan kepada permasalahan Kemitraan atau



kerjasama antara Pemerintah Desa Tanjung Lanjut dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2019.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Tanjut Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Pemerintah khususnya yang berfokus pada kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.
2. Manfaat praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap proses Pemerintah dalam pembangunan sektor Pariwisata Desa dalam Pengelolannya.
3. Sebagai persyaratan untuk mendapat gelar serjana strata (SI) pada jurusan Ilmu Pemerintah Fakultas Syaria'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



F. Kerangka Teori

1. Collaborative Governance

Menurut Ansell dan gash *Collaborative Governance* adalah Pemerintah yang disusun dengan melibatkan badan publik dan organisasi non Pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik, serta asset publik.¹² *Collaborative governance* merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai tujuan. *Collaborative Governance* merupakan kondisi yang dimana Pemerintah berusaha untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu

Collaborative Governance merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (*Government, Private Sector, Civil Society*) yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian konsensus melalui interaksi formal maupun informal pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama. Dalam proses *Collaborative Governance* diperlukan reformasi dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, dan perekrutan SDM.¹³

¹²Ansell. C & Gash. A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.

¹³Ansell. C & Gash. A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.



2. Kemitraan

a. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata partnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu,”. Makna partnership yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.¹⁴ Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsa (2000) menjelaskan bahwa Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.¹⁵

Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama¹⁶.

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁷ :

- 1) Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan Pemerintah, swasta dan masyarakat.

¹⁴Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media. Yogyakarta. 2004. hal. 129

¹⁵Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm.43.

¹⁶Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

¹⁷Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, hlm.43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



- 2) Memiliki kesamaan visi dan misidalam mencapai tujuan bersama.
- 3) Ada kesepakatan antara Pemerintah dan swasta dalam memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
- 4) Saling membutuhkan antara pihak Pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Adapun dasar pertimbangan perlu diperlukannya kerjasama kemitraan Pemerintah , masyarakat dan swasta menurut Utomo mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Alasan politis yaitu menciptakan Pemerintah yang demokratis dan mendorong terwujudnya *good governance*.
- 2) Alasan administratif yaitu adanya keterbatasan sumber daya Pemerintah baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, asset, dan kemampuan manajemen.
- 3) Alasan ekonomis yakni mengurangi kesenjangan atau ketimpangan,
- 4) Memacu pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kontinuitas serta mengurangi resiko.

Atas dasar keempat alasan tersebut di atas maka konsep kerjasama kemitraan yang dijalankan oleh Pemerintah , masyarakat dan sektor swasta diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam proses pembangunan di daerah.¹⁸

b. Model Kemitraan

Kemitraan memiliki beberapa model. Jika diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme yang di angkat ke dalam suatu pemahaman, model

¹⁸Tri Widodo W. Utomo, *Materi Diklat Manajemen Pemerintahan : Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah*. LAN RI, diakses da



kemitraan yang sering digunakan dalam kemitraan pariwisata model tersebut adalah *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.

c. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2) Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).



3) Prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi.¹⁹

d. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “win-win solution partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- 3) Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- 5) Memperluas lapangan kerja;
- 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Konteks kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemitraan atau kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Desa Tanjung Lanjut dan masyarakat Desa Tanjung Lanjut. Pendapat para ahli di atas memaparkan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis

¹⁹ Zeanuri Muchamad, *Kemitraan Pengelolaan Pariwisata*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3: No 02., hlm 305

yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

3. Kebijakan

Menurut Carl Friendrich, dikutip Winarno, mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah dari tindakan yang diajukan atau diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatanataupun kesepakatan dalam rangka mencapai suatu sasaran ataupun tujuan tertentu.²⁰

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan Pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan

²⁰Budi Winarto, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Premindo, 2007, hlm. 16



insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program, aktivitas, tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, dan output.²¹ Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;

- 1) Tingkat hidup masyarakat meningkat
- 2) Terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
- 3) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
- 4) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan²²

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan

²¹Abdullah Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Kebijakan Publik*, Jurnal Publik (JP), Vol 11: No. 01;:Hlm 1-12

²²Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, hlm. 15



pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pemerintah Desa

Menurut HAW.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²³

Menurut HAW.Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” Pemerintah Desa dapat diartikan sebagai : Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁴ Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan perangkat Desa.

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 menyebutkan : Pemerintah Desa adalah Kepala

²³Widjaja. Haw, *Otonomi Desa*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 3.

²⁴Maria Eni Sarasih, *Pemerintah Desa dan Implementasi*, (jakarta, Erlangga, 2006), hlm 23.



Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.²⁵ dalam penyelenggaraanya Pemerintah Desa

harus berdasarkan asas :

- 1) Kepastian hukum
 - 2) Tertib penyelenggaraan Pemerintah
 - 3) Tertib kepentingan umum
 - 4) Keterbukaan
 - 5) Proporsionalitas
 - 6) Akuntabilitas
 - 7) Efektifitas dan efisiensi
 - 8) Kearifan lokal
 - 9) Keberagaman
 - 10) Partisipatif
5. Pengelolaan Pariwisata (wisata)

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.²⁶

Pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana,

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁶ Daryanto, kamus indonesia lengkap, (Surabaya : Apollo, 1997).,hlm., 348



mengorganisasikan , melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²⁷ Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁸

Pengelolaan pariwisata adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran.²⁹ Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapai sasaran yang diinginkan. Proses pengelolaan pariwisata mempunyai dua bentuk pengelolaan:

- a. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Communtly Based Tourism*)

Bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (*Communtly Based Tourism*) dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan

²⁷Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988).,hlm.8

²⁸Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, pengantar manajemen, (Jakarta : Kencana Perdana MediaGoup, 2009). Hlm.6

²⁹



antara kepentingan berbagai stakeholder pembangunan pariwisata termasuk Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Based Tourism menekankan pada pembangunan pariwisata “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Dalam setiap tahapan pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sampai dengan pemantauan (monitoring) dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.³⁰ Peran serta masyarakat di dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata tidak dapat diabaikan.

b. Pengelolaan pariwisata *Top Down*

Top down adalah kebijakan yang bersumber dari pusat dan lebih mendahulukan kepentingan nasional tanpa memperhatikan rakyat di tingkat bawah.³¹ Dampak jangka panjang yang dirasakan dari bentuk pengelolaan ini adalah menurunnya daya kreatifitas masyarakat karena masyarakat terbiasa pada pola petunjuk dari atas atau top down. Masyarakat hanya menikmati kebijakan tanpa bisa merumuskan kebijakan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat setempat.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku-buku atau literature studi kepustakaan ini dilakukan untuk memenuhi atau

³⁰Argyo Demartoto, *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, (Surakarta: UNShaupaya memberdayakan masyarakat dengan mengikutseratakan

³¹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan*, hlm. 38.



mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, yaitu :

Pertama, , skripsi Arisman Mahasiswa Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifiddin Jambi (2019) melakukan penelitian dengan judul: Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipin Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini pertama, Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota jambi sejauh ini sudah berjalan namun masih belum berjalan sepenuhnya. dalam pengembangan objek wisata danau sipin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan sebagai koordinator, fasilitator, stimulator dan komunikator. *Kedua*, hambatan yang dialami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi ada tiga yaitu sumber daya manusia, insfrastruktur pendukung aksesibilitas, perencanaan, serta kurangnya kesadaran masyakat tentang pentingnya pengembangan objek wisata danau sipin. *Ketiga*, Objek wisata danau sipin tentu akan sangat mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Jambi jika dilakukan pengembangan dengan baik dan berkesinambungan.³²

Kedua, Skripsi Kurniawan Ade Az, Mahasiswa Universitas Negri Shuthan Thaha Saifuddin Jambi (2020) melakukan penelitian dengan judul : Upaya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Mengoptimalkan Objek Wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Objek Wisata terbentuk secaraalami dan dapat dikembangkan serta dikelola sehingga menjadi objek daya

³²Arisman,*Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipin Guns Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi , Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN JAMBI,2019



tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Adapun situasi objek wisata tersebut seperti situasi wisata Sungai Batang Hari, Danau Sipin, dan Danau Teluk yang ada di Kota Jambi. *Kedua*, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, menghidupkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, mendata objek wisata di Kota Jambi, sumber daya manusia, dan meningkatkan sarana dan prasarana. *Ketiga*, Adapun yang menjadi kendala Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Jambi dalam meningkatkan Objek wisata di Kota Jambi, keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia, keterbatasan dana, sarana-prasarana yang belum memadai.³³

Ketiga, Skripsi Adhan Aidul, Mahasiswa Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020) melakukan penelitian yang berjudul : Peran Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi. Mendapatkan hasil penelitian Bahwa pengembangan pariwisata sangatlah penting dan dalam pengembangan tersebut melibatkan masyarakat akan tetapi belum maksimal. Dampak pengembangan pariwisata ini berdampak positif pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan terciptanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar Komplek Candi Muaro Jambi. Serta memiliki dampak negatif terdapat antara pedagang dengan Dinas Pariwisata dan juga menimbulkan konflik antar pedagang. Dan yang ketiga, kendala Dinas Budaya dan Pariwisata dalam pengembangan Candi tersebut minimnya dana untuk mempromosikan, kurangnya sumber daya manusia yang

³³Kurniawan Ade Az, *Upaya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Mengoptimalkan Objek Wisata*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN STS JAMBI.2020



membuat lambatnya pengembangan Candi Muaro Jambi tersebut. Agar Candi Muaro Jambi dapat berkembang dengan baik dan dapat meningkatkan wisatawan maka dinas pariwisata harus melakukan promosi, menambah objek dan fasilitas wisata dan menyediakan souvenir khas Muaro Jambi .³⁴

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan , maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiga tinjauan pustaka diatas adalah sama-sama membahas tentang Pariwisata dalam pengembangan dan pengelolaan Objek pariwisata. Dan perbedaan yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus penelitian ,yang mana fokus penelitian yang nantinya akan di tulis iala hanya pada Kemitraan atau kerjasama antara Pemerinta DesaTanjung Lanjut dan Masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

³⁴Aidul Adhan, *peran Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN STS JAMBI.2020

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bermaksud memberikan data lengkap mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³⁶

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data Primer yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara atau data diperoleh secara langsung dilapangan oleh yang melakukan penelitian atau orang yang melakukannya di lokasi penelitian.³⁷ Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Bahan-bahan data

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 126

³⁵Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), Jambi: Syari'ah Press, 2014., hlm 32

³⁶Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*.,hlm.,178

primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁸

Data primer disini adalah suatu data yang diperoleh penulis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala DesaTanjung Lanjut, pihak pengelola yakni direktur BUMDes, dan Manager pengelola wisata Danau Tangkas dan Masyarakat DesaTanjung Lanjut.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari dua data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, atau data skunder adalah yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, mendengar dan melihat secara langsung.³⁹

Data skunder penulis yang dimaksud disini adalah referensi pendukung dari karya ilmiah dan skripsi yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan pariwisata. Selain itu juga dokumentasi dari pihak Pemerintah DesaTanjung Lanjut

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon

³⁸Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*.,hlm.,34

³⁹Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*.,hlm.,178



melainkan juga sebagai pemilik informasi.⁴⁰ Maka yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah : Kepala Desa Tanjung Lanjut, pengurus dari pengelola wisata Danau Tangkas, dan masyarakat Desa Tanjung Lanjut.

C. Tempat Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil penelitian di Wisata Danau Tangkas yang terletak di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Penangambilan lokasi ini sesuai dengan pertimbangan bahwa sumber data dilokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan lebih mengkaji mengenai Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data adalah data yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.⁴¹ Instrumen pengumpulan data merupakan langkah utama dalam kegiatan suatu penelitian, karna tujuan dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh data. Adapun data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

⁴⁰Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm.86.

⁴¹In Tri Rahayu dan Tritiadi Ardi Ardiani, *Observasi dan Wawancara*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004, hlm.12



mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁴² Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.⁴³ Observasi pada penelitian ini merupakan pengamatan langsung tentang bagaimana kemitraan yang terjalin dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas.

2. Wawancara

Wawancara Adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁴ Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung baik itu pengelola wisata, masyarakat dan Pemerintah Desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, atau juga dapat berupa foto, rekaman, dan video yang dapat digunakan sebagai bahan validitas data dalam pengujian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder terkait kemitraan Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata.

⁴²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), hlm. 93-94

⁴³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Unit Press, 1995).hlm 100.

⁴⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*., hlm.127



E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya⁴⁵. Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu.⁴⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika kumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif bentuk (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagian kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁴⁷

⁴⁵Dr. DRs. I Wayan suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Social, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung, Nilacakra: 2018) hlm. 74

⁴⁶Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*,(Edisi Revisi), cet Ke-2 ,hlm 53

⁴⁷Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 40.



3. Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis data yang ada dalam penelitian ini di laksanakan dengan tiga teknik yaitu mereduksi data yang di peroleh hasil wawancara yang telah di rekam kemudian di tarik kesimpulan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di analisis. kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak baik, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut: ⁴⁸

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.

BAB II Metode Penelitian, yang didalamnya membahas mengenai, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab III Gambaran Umum, merupakan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup Profil dari Desa Tanjung Lanjut dan Wisata Danau Tangkas.

⁴⁸Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), hlm 54



Bab IV. Pembahasan, Dalam bab ini membahas kemitraan Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi dan kendala yang dihadapi Pemerintah dan Masyarakat dalam pengelolaannya.

Bab V. Penutup, Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan kemitraan Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

G. Jadwal Penelitian

Tabel.2
Jadwal Penelitian.

N O	KEGIATAN	Maret				Juli				Novembe r				Januari				Februari				Desembe r			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	√																							
2	Pembuatan proposal				√	√																			
3	Pengajuan dosen pembimbing						√																		
4	Perbaikan proposal							√	√																
5	Pengajuan seminar									√															
6	Pelaksanaan seminar											√													
7	Perbaikan proposal yang telah diseminarkan													√											
8	Pengajuan surat izin riset													√											
9	Riset lapangan														√										
10	Penyusunan data															√									
11	Penulisan skripsi															√	√	√							
12	Perbaikan dari pembimbing																								
13	Penyempurnaan skripsi																								
14	Munaqasah																								
15	Wisuda																								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Tanjung Lanjut

1. Sejarah Penamaan Desa Tanjung Lanjut

Dahulu yang menjadi Kepala Dusun yang pertama kali di Dusun DesaTanjung Lanjut adalah Datuk Rd. Yasin menurut keterangan tokoh masyarakat beliau lah yang memberi nama Desa ini Manjadi DesaTanjung Lanjut makna dan arti Tanjung adalah suatu Dusun yang dikelilingi oleh Danau dan Lanjut mempunyai arti sendiri yaitu tujuan Hidup yang berkelanjutan dengan demikian makna DesaTanjung Lanjut adalah Masyarakat yang Hidup disekeliling Danau mempunyai tujuan secara berkelanjutan. Dalam hal penamaan nama Desa ini dapat kita simpulkan bahwa Datuk Rd. Yasin mempunyai ekspetasi yang tinggi terhadap Desa dan Masyarakatnya dimasa yang akan datang.⁴⁹

2. Sejarah Generasi Kepala Desa Tanjung Lanjut

Masa Kepemimpinan Datuk Rd. Yasin menjadi kepala dusun kurang lebih 13 Tahun lamanya,beliau adalah sosok pahlawan pejuang 45 karena jasa-jasanya dan kegigihannya dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia beliau di angkat untuk menjadi kepala dusun di DesaTanjung Lanjut karena beliau di anggap mampu menjadi seorang pemimpin di DesaTanjung Lanjut pada saat itu. Setelah beliau Wafat pada tahun 1961 maka terjadi kekosongan kepemimpinan di DesaTanjung Lanjut maka kepala marga awin yaitu Datuk Basirah Sidik

⁴⁹Kantor Desa Tanjung Lanjut,*Naskah RPJM Desa Tanjung Lanjut* , 20 Januari 2021

menunjuk langsung Datuk Rd. Abu Hasan untuk menjadi Kepala Dusun generasi kedua di Desa Tanjung Lanjut.

Pada masa kepemimpinan Datuk Rd. Abu Hasan setelah undang-undang nomor : 22 Tahun 1948 tentang Marga Mendapo dan Kampung kemudian diteruskan karena terjadi agresi Belanda I dan II kemudian pada Tahun 1965 IGO dan IGOB di cabut dan diganti dengan undang-undang nomor : 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan dan mempercepat terbentuknya daerah tingkat II diseluruh wilayah indonesia. Undang-undang menganggap IGO dan IGOB telah usang dan telah mengandung unsur kolonial dan Federal tetapi undang-undang itu belum mengandung otonom penuh kepada Desa dan tidak selaras dengan Adat-istiadat sebab itu banyak timbul reaksi dari Rakyat sehingga undang-undang tersebut tidak jadi diberlakukan sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintah Desa undang –undang ini dan segala peraturan dan pelaksanaannya baru menjurus pada pengaturan Pemerintah nya saja maka pelaksanaan tugas administratif sedangkan hal yang berkenaan dengan keamanan, keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat seperti yang terdapat dalam kesadaran undang-undang ini belum diperhatikan dan dilaksanakan maka di Desa-Desa di Jambi timbul keguncangan, dan perubahan masyarakat menjurus pada perubahan nilai yang bersifat negatif.

Dalam kaitannya undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemeritahan Desa barulah terbentuk Desa Definitif hal ini dijelaskan oleh tokoh Masyarakat (Datuk M.A.Sani) terjadilah pemilihan Kepala Desa Generasi



ke-III secara Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) maka terpilihlah Datuk Rd. Thalib sebagai Kepala DesaTanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Batang Hari beliau adalah sosok pensiunan TNI mempunyai karakter yang tegas dan berwibawa beliau adalah sosok pemimpin yang sangat disegani oleh masyarakat DesaTanjung Lanjut namun beliau tidak lama memimpin hanya kurang lebih 3 Tahun karena rentannya usia beliau meninggal Dunia pada Tahun 1984. kemudian terjadi pemilihan kembali oleh masyarakat DesaTanjung Lanjut yaitu Kepala Desa Generasi yang ke-IV yang bernama Datuk Rd. Somad sebagai Kepala DesaTanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi beliau mendapat gelar baik secara Adat dengan panggilan Datuk Penghulu karena pepatah Jambi mengatakan Kepala Desa atau Datuk Penghulu itu adalah sebagai pemangku adat, beliau memimpin DesaTanjung Lanjut mulai Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2001 kemudian terpilih lagi Generasi ke –V Datuk M. Saman.T selama kurang lebih 2 periode pemilihan mulai dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2013 pada masa awal kepemimpinan beliau terjadi pemekaran wilayah Kabupaten dari Kabupaten Batang Hari DesaTanjung Lanjut masuk dalam wilayah pemekaran Kabupaten Muaro Jambi sehingga DesaTanjung Lanjut menjadi Desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang Hari dengan batas Alam yaitu Sungai Kaos.

Setelah berakhirnya masa Jabatan Datuk M. Saman.T dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa maka terpilihlah Kepala Desa Generasi ke VI Periode 2013-2019 yang bernama Datuk Edi Sugito beliau adalah keturunan Jawa, yang tanah kelahirannya di DesaTanjung Lanjut , Beliau adalah anak dari seorang



petani/pekebun Ayahnya yang bernama Kasdi Dan Ibunya Yang bernama Seripah. Kakeknya yang bernama H. Sarwi sudah merantau ke DesaTanjung Lanjut ini sejak Tahun 1959 karena sulitnya perekonomian di Pulau Jawa ditambah lagi permasalahan G 30 S PKI yang semakin meresahkan masyarakat beliau memutuskan Hijrah kepulauan Sumatera beserta keluarganya tepatnya di DesaTanjung Lanjut. dimasa Pemerintah Datuk Edi Sugito yang sudah berjalan enam Tahun ini beliau sudah banyak menyumbangkan Waktu,Tenaga,dan pikirannya kepada DesaTanjung Lanjut sehingga sudah banyak perubahan yang dinikmati dan dirasakan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung seperti contohnya Jalan, Jembatan, dan Penerangan Listrik Negara (PLN), selain itu beliau mempunyai Visi dan Misi untuk merubah DesaTanjung Lanjut ini menjadi Desa yang lebih baik sesuai dengan Filosofi penamaan DesaTanjung Lanjut yaitu membangun Masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.⁵⁰

B. Geografis Desa Tanjung Lanjut

1. Letak Geografis

DesaTanjung Lanjut merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) Desa dan 5 (lima) Kelurahan. DesaTanjung Lanjut memiliki luas wilayah ± 5113,44 Hektar yang secara administratif Pemerintah terbagi dalam 4 (empat) Dusun dan 6 (enam) RT.

⁵⁰Kantor Desa Tanjung Lanjut , *Naskah RPJM Desa Tanjung Lanjut* , 20 Januari 2021



Tabel. 3

Luas Dusun Desa Tanjung Lanjut⁵¹

NO	Dusun	Rt	Luas (Ha)	%
1	Tanjung	01	481,02	9,4
2	Mandian	02, 06	1625,68	31,7
3	Tanjung Buluh	04	661,11	13,02
4	Tanjung Sri Bulan	05, 03	2340,73	45,7

Wilayah Desa Tanjung Lanjut terletak di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Suko Awin Jaya / Bukit Baling
 - b. Sebelah selatan : Desa Kaos
 - c. Sebelah timur : Desa Kaos
 - d. Sebelah barat : Desa Suak Putat
2. Orbitasi
- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 17,00 KM
 - b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 20 Menit
 - c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 15 KM
 - d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 30 Menit
 - e. Jarak tempuh ke Provinsi : 30 KM
 - f. Lama jarak tempuh ke Provinsi : 60 Menit

⁵¹Kantor Desa Tanjung Lanjut, *Profil Desa Tanjung Lanjut*, 20 Januari 2012



C. Demografi Desa Tanjung Lanjut

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal awal dalam pembangunan dan perkembangan sebuah Desa, begitu pula dengan perkembangan sebuah wisata di suatu Desa. Jumlah penduduk Desa Tanjung Lanjut pada awal tahun 2019 adalah 1.250 jiwa dengan laki-laki berjumlah 672 dan perempuan sebanyak 581 dengan jumlah kk 387.

Tabel. 4

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Lanjut⁵²

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
672	581	1.253

2. Pendidikan

- a) SD/ MI : 873 Orang
- b) SLTP/ MTs : 50 Orang
- c) SLTA/ MA : 35 Orang
- d) S1 : 9 Orang
- e) Diploma : 7 Orang
- f) S2 : 0 Orang
- g) S3 : 0 Orang
- h) Putus Sekolah : 100 Orang

⁵²Kantor Desa Tanjung Lanjut , *Naskah RPJMDes Desa Tanjung Lanjut* , 20 Januari 2021

- i) Buta Huruf : 4 Orang
- j) SLB : 3 Orang

Lebaga pendidikan Di DesaTanjung Lanjut memiliki, gedung TK/PAUD sebanyak 3 unit, Sekolah Dasar (SD) 2 Unit, dan Madrasah Diniyah sebanyak 2 unit.

3. Keadaan Ekonomi

Mata Pencaharian masyatakat DesaTanjung Lanjut, Petani : 600 Orang, Pedagang : 10 Orang, PNS : 2 Orang, Tukang Bangunan : 10 Orang,Guru : 15 Orang , Bidan/Perawat : 2/2 Orang, TNI/ Polri : - Orang , Pesiunan : - Orang , Sopir/ Angkutan : - Orang, Buruh : - Orang, Jasa persewaan : - Orang, Swasta : 50 Orang , Peternak : 200 Orang.

4. Aspek Pemerintah Desa

a. Lembaga Pemerintah

- 1) Kepala Desa : 1 orang
- 2) Sekretaris Desa : 1 orang
- 3) Perangkat Desa : 10 orang
- 4) BPD : 5 orang

b. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di DesaTanjung Lanjut, Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) 1 Kelompok, Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1 kelompok, 6 Rukun Tetangga (RT), 1 Kelompok Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT), 2 Kelompok Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), 12 Kelompok Pengajian, 12 Kelompok Arisan, 1 Kelompok Simpan Pinjam, 22



Kelompok Tani, 1 Kelompok Karang Taruna, dan 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁵³

D. Visi dan Misi Desa Tanjung Lanjut

Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan pembangunan di Desa melalui bidang penyelenggaraan Pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat, dapat benar-benar menjadi solusi mengatasi persoalan ditingkat masyarakat dengan tetap mengacu pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tanjung Lanjut, mandiri, kuat dan sejahtera. Sebagaimana rumusan Visi dan Misi Kepala Desa Tanjung Lanjut.

⁵³Kantor Desa Tanjung Lanjut, *Naskah RPJMDes Desa Tanjung Lanjut*, 20 Januari 2021



a. Visi Desa Tanjung Lanjut

“Terwujudnya Masyarakat yang Demokratis, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera menuju Desa membangun dengan prinsip jujur dan adil”

b. Misi Desa Tanjung Lanjut

Misi Desa Tanjung Lanjut yang tertera pada RPJMDes tahun 2013-2019 adalah sebagai berikut⁵⁴:

1. Mewujudkan pelayanan yang profesional melalui peningkatan tata kelola Pemerintah Desa yang responsif, akuntabel dan transparan.
2. Membangun kualitas sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai agama, sosial, budaya dan kearifan lokal.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan Desa dan Sumber daya alam
4. Mengembangkan seluruh potensi Desa demi mewujudkan pendapatan asli Desa yang maksimal.
5. Meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembangunan disegala bidang yang efektif dan efisien

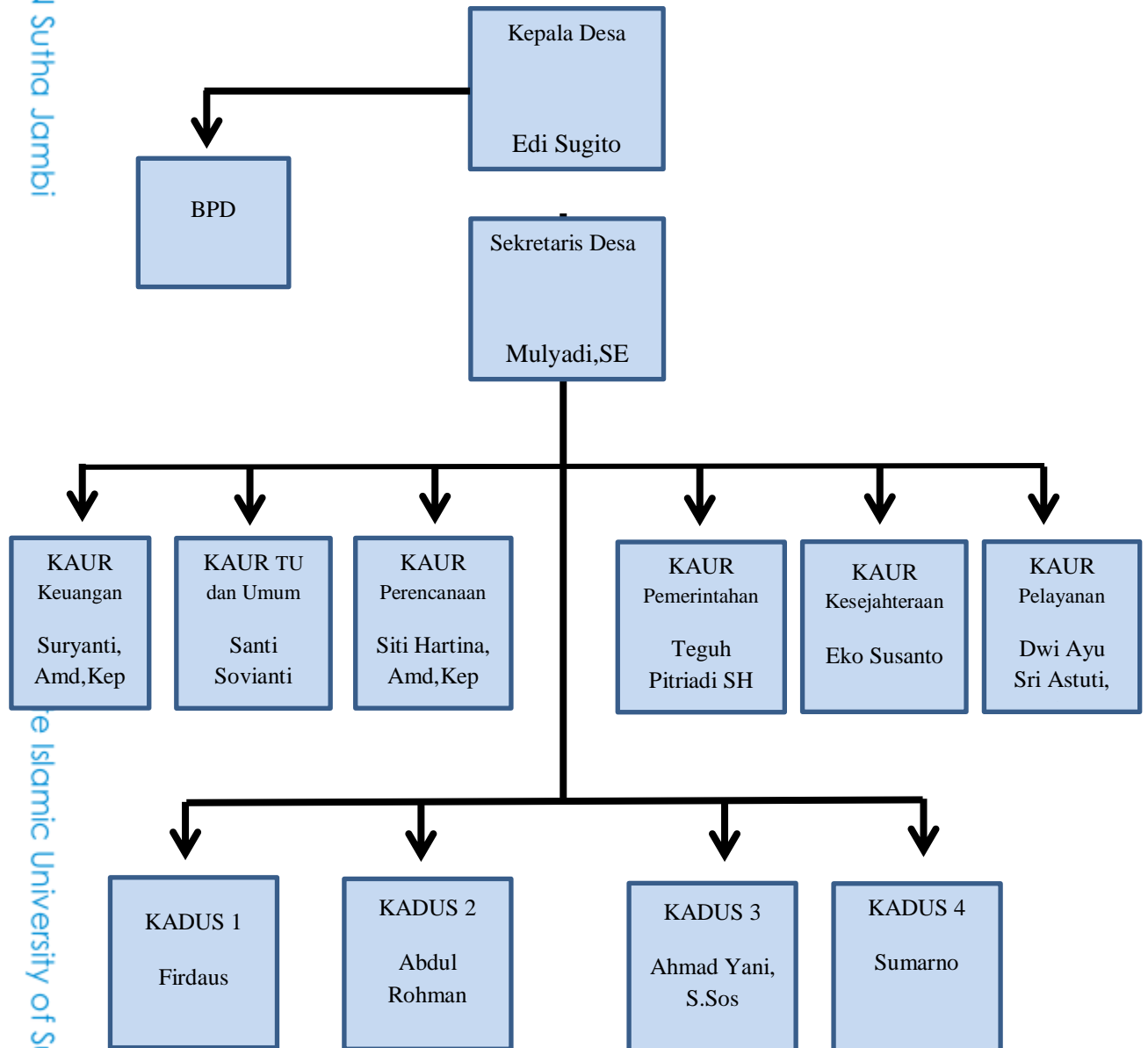


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

⁵⁴Kantor Desa Tanjung Lanjut , *Naskah RPJMDes Desa Tanjung Lanjut* , 20 Januari 2021

Gambar. 1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Lanjut⁵⁵

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

E. Wisata Danau Tangkas

1. Sejarah Danau Tangkas

Sejarah terbentuknya wisata Danau Tangkas ini pada awalnya merupakan inisiatif dari bapak Edi Sugito yang merupakan Kepala Desa Tanjung Lanjut. Terbentuknya wisata Danau Tangkas ini juga berlandaskan adanya Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 terkait perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya kementerian Desa PPDT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi masyarakat Desa. Kemudian dikuatkan lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa, serta melihat potensi yang dimiliki Desa Tanjung Lanjut yang memiliki danau yang mempunyai luas + 403 Ha, barulah Pemerintah bersepakat bahwa pengelolaan wisata Danau Tangkas ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa yang bernama Badan Usaha Milik Desa Tanjung Jaya Mandiri (BUMDes TAJAM).

Sebelum adanya penamaan Danau Tangkas, tempat ini dahulunya masyarakat sekitar danau sering menyebutnya sebagai sungai kaos, lopak itik, dan suak. Penamaan Danau Tangkas ini muncul dari hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Dimana penamaan Tangkas ini merupakan gabungan dari dua Desa dan dua Kabupaten, memiliki dua suku kata yaitu Tang dan Kas, Tang yang berarti Desa Tanjung yang terletak di Kabupaten Muaro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Jambi dan Kas berarti Desa Kaos yang terletak di Kabupaten Batanghari dan dipadukan menjadi TANGKAS. Penamaan Danau Tangkas memiliki makna, bahwa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat haruslah tangkas dalam segala aspek kehidupan.⁵⁶

2. Wisata Alam Danau Tangkas

Wisata Danau Tangkas ini merupakan salah satu destinasi wisata alam baru yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya berada di Desa Tanjung Lanjut yang berada di perbatasan antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Wisata alam Danau Tangkas mulai dibuka oleh Pemerintah Desa Tanjung Lanjut pada 19 Agustus 2018. Dimana wisata ini diresmikan langsung oleh Bupati Muaro Jambi. Untuk menuju dan sampai di wisata ini harus menempuh 1 hingga 2 jam perjalanan darat dari pusat Kabupaten.

Wisata alam Danau Tangkas ini menawarkan keindahan danau seluas +250 Hektar, dengan keindahan hutan diatas air yang diberi nama hutan liontin dimana di atasnya ditumbuhi banyak pohon putat. Wisata ini menawarkan perjalanan menyusuri dan mengelilingi lorong-lorong hutan liontin yang dikiri dan kanannya terdapat rumah pohon menggunakan perahu tradisional. Wisatawan yang berkunjung di wisata Danau Tangkas ini juga dapat menikmati berbagai permainan air seperti, banana boat, donat boat, speed boat, bebek dayung, perahu tradisional dan perahu karet. Di wisata alam Danau Tangkas ini juga menyediakan lokasi berkemah untuk wisatawan yang ingin berkemah di pulau tepus.

⁵⁶Wawancara penulis dengan Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut, 20 Januari 2021



Untuk memasuki wisata alam Danau Tangkas ini wisatawan dikenakan biaya tarif masuk sebesar 5.000.00, dan untuk pengunjung yang ingin menyebrang kepulau tepus menggunakan speed boat dikenakan biaya sebesar 10.000.00 perorang, dan bagi pengunjung yang ingin menikmati permainan air seperti banana boat, donat boat, speed boat, bebek dayung, perahhu tradisional dan perahu karet dikenakan biaya 15.000.00 perorang.⁵⁷

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁵⁷Wawancara penulis dengan Bapak Japar selaku Manager wisata danau tangkas, 20 Januari 2021

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sistem Pengelolaan Wisata Danau Tangkas Di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi

Dalam upaya pencapaian tujuan untuk mendukung pengelolaan objek wisata Danau Tangkas yang baik maka sangat dibutuhkannya manajemen yang sangat baik untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan objek wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang di ingin dicapai yang didalamnya yang meliputi proses, perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan pengawasan.

Oleh karena itu, perlu adanya pengorganisasian, perencanaan, dan pengawasan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengelolaan objek wisata alam Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut. Maka penulis akan menjelaskan dan menguraikan, hal-hal tersebut yang didukung oleh data dan informasi yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang peneliti peroleh dari informan penelitian.

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan aturan atau pengaturan pembagian kerja tugas hak dan semua kewajiban semua orang yang masuk dalam suatu kelompok organisasi dan merupakan proses pengelompokan, tugas-tugas, orang-orang, tanggung jawab dan wewenang. Proses pengorganisasian adalah suatu



pengelompokan orang-orang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab, jika diikuti dengan pengelompokan fasilitas dan bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas tersebut.

Dalam perincian kerja mengelola objek wisata alam Danau Tangkas lembaga lokal Desa yang sangat berperan penting dalam mengelola objek wisata tersebut perincian kerja dimaksud untuk terarahnya dalam melakukan pengelolaan sehingga apa yang menjadi tujuan pengelola dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

Pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁵⁸

⁵⁸Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana MediaGoup, 2009). Hlm.6

Pengelolaan pariwisata adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Objek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas sumberdaya hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Tanjung Lanjut, Edi Sugito mengatakan:

“Untuk sistem pengelolaan wisata alam Danau Tangkas ini pengelolaannya melalui badan usaha milik Desa yang kami diberi nama badan usaha milik Desa Tanjung Jaya Mandiri yang memiliki 6 unit usaha salahsatunya adalah unit usaha pariwisata, nah jadi pengelolaannya itu sepenuhnya unit usaha tersebut yang mengelolanya jadi mulai dari masyarakat kita yang ada disini yang berkerja jadi dalam unit usaha tersebut ada struktur namanya meneger, skretaris, bendahara, dan anggota dalam bentuk pengurusannya dan yang dikelola itu danau yang luasnya kurang lebih 250 HK, yang masuk diwilayah Desa Tanjung Lanjut , dari 250 HK yang dimanfaatkan hanya sekitar 25 HK saja.”⁵⁹

Terkait penjelasan Kepala Desa Tanjung Lanjut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Lanjut Dalam sistem pengelolaan pariwisata Danau Tangkas Pemerintah telah melakukan pengelolaan pariwisata dengan baik Pemerintah Desa mengembangkan pariwisatanya melalui Badan Usaha Milik Desa Yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa Tanjung Jaya Mandiri. Namun tetap memperhatikan faktor lingkungan dan menjaga keberlangsungan wisata tersebut. Melihat dari keindahan alam serta keragaman dari masyarakat Danau

⁵⁹Wawancara dengan bapak Edi Sugito, Kepala Desa Tanjung Lanjut, 20 Januari 2021



Tangkas yang dimiliki maka sangat menguntungkan apabila hal-hal tersebut dikelola serta dikembangkan, semua ini bertujuan untuk memperkenalkan aset Desa yang perlu di kembangkan lebih luas lagi.

Dimana dalam pengelolaannya dikelola oleh badan usaha milik Desa Tanjung Jaya Mandiri yang mempunyai fungsi:

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Tanjung Lanjut
2. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Tanjung Lanjut
3. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Tanjung Lanjut

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga mampu mendapatkan sumber pendapatan asli Desa yang memungkinkan Desa mampu melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal.⁶⁰

Badan Usaha Milik Desa Tanjung Jaya Mandiri mempunyai visi “Mewujudkan masyarakat Desa yang kreatif dan inovatif” dan mempunyai misi “Menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan, Teknologi dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan.”

Dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan Usaha, BUMDes Tanjung Jaya Mandiri berpedoman pada:

1. Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 dan pasal 88

⁶⁰Kantor Desa Tanjung Lanjut, *Profil BUMDes* , 20 Januari 2021

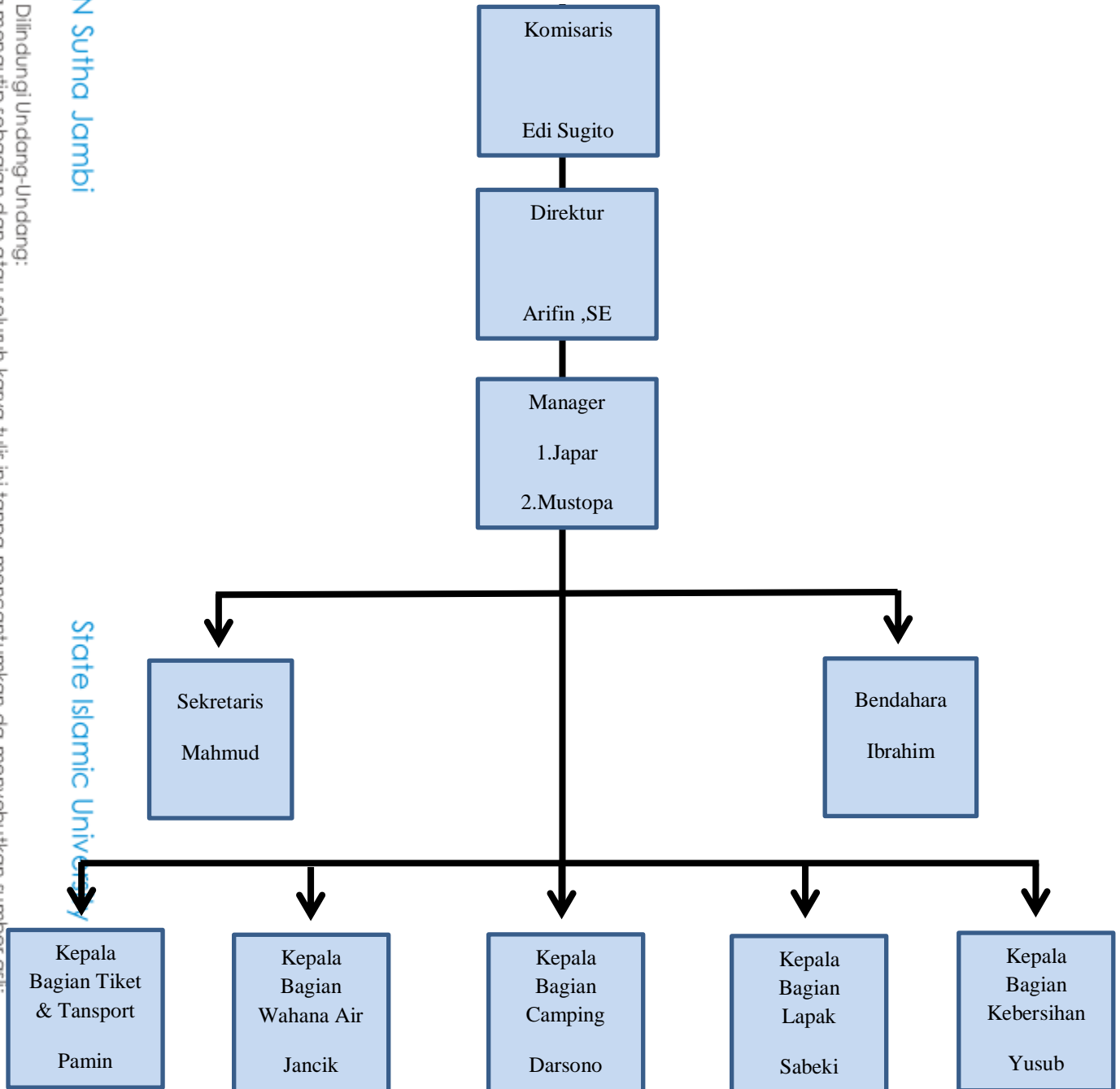
2. Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 dan peraturan Pemerintah no.47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan Pemerintah no.43 tahun 2014 tentang peraturan pealaksana Undang-Undang Desa, khususnya Bab VIII tentang BUMDes pasal 132 terkait tentang pendirian BUMDes
3. Peraturan Menteri Desa daerah tertinggal dan transmigrasi republic Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang pendirian dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan DesaTanjung Lanjut Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.⁶¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶¹Kantor Desa Tanjung Lanjut, *Profil BUMDes*, 20 Januari2021

Gambar.2

Struktur Pengelola Wisata Alam Danau Tangkas⁶²⁶²Kantor Desa Tanjung Lanjut, *Struktur Pengelola Wisata Danau Tangkas*, 19 Februari

2. Perencanaan

Perencanaan ialah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui penetapan tujuan dan cara penyampaiannya. Dalam manajemen pengelolaan objek wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut diperlukan adanya perencanaan dalam pengelolaannya. Karena sesuatu kegiatan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan akan sulit untuk mencapai tujuan yang secara optimal. Hal ini berkaitan karena tidak ada pedoman apa yang dilakukan, berapa jumlahnya, bagaimana melakukannya, dan lain sebagainya. Keadaan ini akan menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan tidak teratur, tidak efektif dan efisien.

Dua alasan dasar perlunya perencanaan dilakukan. Pertama, berkaitan dengan “*protective benefit*” dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dengan adanya perencanaan. Kedua, berkaitan “*positif benefit*” diperoleh dalam bentuk peningkatan sukses pencapaian tujuan organisasi karena adanya perencanaan. Dengan adanya perencanaan, sebagai sarana untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan timbulnya hal-hal diluar dugaan, digunakan sebagai alternatif untuk memecahkannya, sehingga lebih luas memungkinkan untuk menghasilkan output lebih baik.⁶³

⁶³Abdul Hadi dan Ernawati, “Menejemen Penyelenggaraan pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun di Kabupaten Linggau,” *Jurnal Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.02.No.1,(Februari 2015),hlm.5.



Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan yang ingin dicapai dimasa depan, serta memutuskan tugas dan sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan terhadap pengelolaan objek pariwisata Danau Tangkas di DesaTanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi agar dapat menghasilkan hasil dan mafaat yang ingin dicapai. Perencanaan objek wisata melalui penyusunan RIPOW (Rencana Induk Pengembangan Wisata), ditunjukkan untuk meningkatkan daya tarik wisata sesuai dengan karakteristik potensi yang dimiliki Danau Tangkas.

Dalam menjalankan kepariwisataan dalam perancangan tidak lepas dari aspek yang berhubungan dengan pariwisata, dengan demikian perencanaan objek pariwisata mencakup seluruh stekholder yang berkaitan dengan pariwisata ini antara lain:

1. Pihak Pemerintah
2. Para pelaku usaha pariwisata
3. Masyarakat

Wawancara dengan Bapak Edi sugito selaku Kepala DesaTanjung Lanjut beliau mengatakan :

“wisata Danau Tangkas ini memiliki perencanaan pengembangan kedepannya yaitu ingin membangun wisata berkonsep ploting market di dalam hutan liontin,serta memiliki perencanaan memakai konsep kapal layar dengan menjelajahi Danau Tangkas seluas 250 Ha. Perencanaan kedepannya juga akan membangun vila klasik dengan Desain rumah adat jambi sebanyak 30 unit, serta ingin memiliki gedung pelatian atau pertemuan dengan fasilitas sekelas hotel, serta perencanaan penambahan



lokasi camping dan membangun jembatan gantung sebagai penghubung dari pulau tepus ke tanjung tinggi”⁶⁴

Dari hasil wawancara penulis bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan objek wisata alam Danau Tangkas ini masih belum dapat terealisasi, dikarenakan minimnya anggaran untuk melaksanakan rencana pengembangan objek wisata Danau Tangkas ini. Dalam perencanaan yang ingin dilakukan kedepannya oleh Pemerintah Desa dan pihak pengelola wisata Danau Tangkas ini tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan pengembangan objek wisata Danau Tangkas ini adalah untuk mebenahi dan meperindah objek wisata alam Danau Tangkas agar dapat meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke wisata alam Danau Tangkas serta meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan PAD melalui wisata.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu yang sangat penting dilakukan setelah perencanaan, dengan pelaksanaan manajemen begitu pula dalam penyelenggaraan pengelolaan objek wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi. Pengawasan atau *controlling* terhadap aktivitas aktivitas yang telah dilaksanakan.

Wawancara dengan Arifin, SE selaku Direktur Bumdes Tanjung Jaya Mandiri beliau mengatakan:

“Untuk pengawasan dalam pengelolaan wisata alam Danau Tangkas, melakukan pengawasan kinerja terhadap pengelola wisata. Pemerintah Desa disini Kepala Desa turun langsung kelapangan untuk melihat bagaimana kinerja pengelola dalam menjalankan objek wisat selain itu

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut, 20 Januari 2021



juga diawasi oleh Bumdes induk karna wisata ini merupakan unit usaha yang dibawah naungan Bumdes induk Tanjung Jaya Mandiri, jika terjadi kesalahan maka langsung akan diberikan tindakan arahan dan teguran terhadap apa yang terjadi, dan kami selau mengadakan rapat seminggu atau dua minggu sekali untuk melihat, mebahas dan mengevaluasi terhadap pengelolaan wisata Danau Tangkas ini.”⁶⁵

Dalam pengawasan pengelolaan wisata alam Danau Tangkas dalam pengawasan selalu dipantau dan diawasi langsung oleh Kepala Desa Tanjung Lanjut yang merupakan komisaris, dan bekerja sama dengan BPD. Pemerintah Desa dan BPD lah yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola wisata dalam mengelola objek wisata Danau Tangkas dalam pengawasan terhadap nilai standar, dimana adanya standar penilaian disini dimaksud mengandung arti tindakan penilaian terhadap apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah dilaksanakan pengelola dalam mengelola objek wisata alam Danau Tangkas sesuai dengan petunjuk-petunjuk arahan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa Pemerintah Desa telah melakukan pengawasan terhadap pengelola wisata alam Danau Tangkas. Hal ini juga didukung dan dibuktikan melalui observasi penulis bahwa dari pihak Pemerintah Desa selalu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wisata, dimana pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh kepala Desa yang juga merupakan komisaris dari wisata Danau Tangkas. Mengenai pengawasan yang dilakukan dari pihak Pemerintah Desa itu juga diawasi oleh Bumdes induk

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Arifin, SE selaku Direktur Bumdes Tajam, 20 Januari 2021



dengan cara selalu melakukan pengawasan secara langsung dengan melihat keadaan dilapangan terhadap pengergonasian wisata Danau Tangkas.⁶⁶

4. Koordinasi

Kordinasi merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Koordinasi merupakan proses penyatupaduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit terpisah (bagian atau bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai).

Berkoordinasi terjadi dalam bentuk komunikasi formal atau informal. Komunikasi formal terjadi seperti rapat bulanan atau rapat dalam forum. Sedangkan komunikasi bersifat informal terjadi seperti pertemuan antar pejabat/pegawai diluar jam kerja. Komunikasi yang dilakukan dalam berkoordinasi juga menggunakan alat komunikasi seperti telepon dan menggunakan jaringan internet. Tanpa koordinasi yang baik akan sulit untuk dapat tercapainya keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk mencapai tujuan. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pengelola wisata Danau Tangkas dilakukan dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1) Mengangkat koordinator

Koordinasi merupakan sesuatu usaha penting yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi serta produktifitas kerja untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa koordinasi yang baik dalam lembaga akan sulit

⁶⁶Observasi Terhadap Pengawasan Pengelolaan di Wisata Danau Tangkas, 20 Januari 2021



untuk dapat tercapainya keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk meraih tujuan yang hendak dicapai dalam wisata Danau Tangkas ini. Peningkatan koordinasi sangat diperlukannya mengangkat koordinator dilapangan untuk memantau kegiatan dilapangan agar dalam pencapaian tujuan dapat berjalan dengan lancar dan efektif serta efisien dibandingkan sebelumnya

Wawancara dengan Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa dan Komisaris wisata alam Danau Tangkas beliau mengatakan:

“Dalam menjalankan sebuah pariwisata tentu harus adanya koordinasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, disini kami Pemerintah Desa selalu berkoordinasi dengan pihak pengelola yaitu dengan managernya yang merupakan koordinator lapangan untuk mengatasi jika ada permasalahan dilapangan jika tidak selesai dari managernya yah saya selaku komisaris yang turun untuk mengatasi masalah yang terjadi”⁶⁷

Dari hasil wawancara penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas telah mengangkat koordinator lapangan yang merupakan manager wisata tersebut untuk mengatasi apabila ada suatu masalah maka dapat diselesaikan dengan baik dan cepat oleh seorang koordinator.

2) Mengadakan pertemuan formal maupun informal

Pemantapan koordinasi dapat dilakukan dengan mengadakan rapat antar organisasi, antar bagian dalam organisasi maupun antar unit kerja. Wawancara dengan bapak Japar selaku Manager wisata Danau Tangkas beliau mengatakan:

“Kami pihak pengelola juga sering melakukan pertemuan atau rapat-rapat untuk berdiskusi dengan Pemerintah Desa serta dengan bumdes induk karna kami bagian dari bumdes induk dan juga melakukan pertemuan

⁶⁷Wawancara penulis dengan Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa dan komisaris wisata danau tangkas, 27 Januari 2021



sesama pengelola dan masyarakat yang melakukan investasi wisata, itu dilakukan seminggu sekali untuk membahas sasaran dari kegiatan-kegiatan seta menjaga hubungan baik sesama pihak bermitra.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Japar dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wisata ini untuk meningkatkan koordinasi antar pengelola dan pihak bermitra dalam wisata Danau Tangkas ini selain mengangkat koordinator juga mengadakan pertemuan atau rapat untuk berdiskusi guna meningkatkan efektivitas dan efisensi serta produktifitas dalam pengembangan dan pengelolaan wisata guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3) Berhubungan melauai alat perhubungan

Dalam melakukan koordinasi antara bagian-bagian organisasi yang berjarak jauh dapat dilakukan tanpa mereka bertemu satusama lain yaitu dengan menggunakan alat komunikasi. Hal ini juga dilakukan dalam koordinasi di dalam pengelolaan objek wisata Danau Tangkas seperti melakukan komunikasi, handphone, selain itu dalam berkerja dilapangan pengelola wisata juga menggunakan HT (*Handy Talky*) untuk saling berkoordinasi dan memeberikan arahan.⁶⁹

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis terhadap poin-poin yang dilakukan dalam koordinasi menunjukkan bahwa sejauh ini Pemerintah Desa Tanjung Lanjut dan pihak pengelola telah melakukan koordinasi dalam pengelolaan objek wisata Danau Tangkas. Hal ini bisa dilihat dari koordinasi yang dilakukan melauai mengangkat koordinator, mengadakan pertemuan formal

⁶⁸Wawancara penulis dengan Bapak Japar selaku Manager wisata danau tangkas, 27 Januari 2021

⁶⁹Observasi Koordinasi dalam pengelolaan wisata danau tangkas, di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi, 27 Januari 2021.



maupun informal dan berhubungan melalui alat perhubungan mealalui media massa dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini dilakukan guna menyelaraskan kesatuan tindakan, keseimbangan antar bagain dan penyatu-paduan sasaran untuk mencapai tujuan secara efisien dengan prinsip keselarasan.

B. Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas

Kemitraan mempunyai arti perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Bertolak dari pengertian di atas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan . Sesuai dengan pembahasan yang dibahas pada Bab III tentang syarat dan ketentuan kemitraan yaitu: Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan Pemerintah , swasta dan masyarakat, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan antara Pemerintah dan masyarkat dalam pengelolaan wisata yang memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, Saling membutuhkan antara pihak yang melakukan kemitraan dan memiliki peran masing-masing yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling membutuhkan. Kemitraan yang diterapkan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata harus mempunyai konsep yang jelas dan memberikan manfaat masyarakat sekitar.

Dalam kemitraan kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan kemitraan yaitu meningkatkan pendapatan usaha kecil masyarakat, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan dan meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil serta meningkatkan ekonomi



pedesaan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Terjalannya kemitraan antara Pemerintah Desa Tanjung Lanjut dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tagkas, mengingat dengan adanya tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan dan azas manfaat bersama. Prinsip-prinsip ini penting di perhatikan dalam menjalin kemitraan antar pihak bermitra karena dalam menjalin kemitraan harus melihat karakteristik dari prinsip yang dijalankan bersama.⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut Edi Sugito beliau mengatakan:

“Kemitraan atau kerjasama yang terjalin antara kami Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas ini aialah dimana dari pihak Pemerintah Desa mengajak masyarakat untuk menjadi pengelola wisata dengan bergabung menjadi anggota bumdes bagian pariwisata untuk dapat membantu Pemerintah mengelola wisata Danau Tangkas. Untuk sistem kerja atau bagi hasilnya , jadi pendapatan yang didapat oleh omset dari wisata Danau Tangkas ini diatur melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 didalamnya ada sistem pengelolaan keuangan dimana masyarakat yang bergabung atau berkerja dalam pengelolaan wisata ini mendapat mendapat gaji harian, sistem gaji harian ini mempunyai konsep jika pendapatan yang dihasilkan wisata Danau Tangkas perhari dibawah 5 Juta. Maka pendapatan dibawah 5 juta ini dibagi menjadi 2 bagian, bagian yang pertama 50% untuk pekerja yang mengelola wisata, untuk bagian 50% lagi masuk ke unit usaha wisata, didalam 50% ini dibagi lagi, 20% untuk pemilik tanah di wisata Danau Tangkas, 25% pengurus bumdes induk dan unit usaha wisata, 5% untuk kegiatan sosial dan 5% untuk oprasional dan ATK, kemudian sisanya 45% dimasukkan ke pendapatan asli Desa. Namun jika pendapatan perhari wisata Danau Tangkas diatas 5 juta maka masyarakat yang berkerja dalam

⁷⁰Zeanuri Muchamad, *Kemitraan Pengelolaan Pariwisata*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3: No 02., hlm 305



pengelolaan wisata Danau Tangkas perharinya mendapatkan gaji 120.000 perhari untuk masyarakat yang berkerja diwisata Danau Tangkas.⁷¹

Selain kemitraan atau kerjasama masyarakat menjadi pengelola, terdapat kemitraan atau kerjasama lain antara Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas yakni dalam bidang investasi. Masyarakat diajak untuk melakukan investasi dengan ikut serta menyediakan wahana atau kebutuhan yang dibutuhkan pengunjung dengan sistem , pengelola wisata yang mengoprasionalkan apa yang di investasikan masyarakat dengan sistem bagi hasil yang telah di tentukan.

Wawancara dengan ibu sumina selaku masyarakat yang melakukan investasi di wisata Danau Tangkas:

“Kami masyarakat yang tidak ikut menjadi pengelolaan dan pengurus wisata Danau Tangkas, bisa melakukan kerjasama dalam bentuk investasi penanaman modal seperti menaruh barang-barang atau menaruh objek permainan di wisata Danau Tangkas seprti menaruh permainan odong-odong, permainan pancingan dengan mereka pengurus wisata yang menjalankannya dengan sismtem bagi hasil 50% untuk kami dan 50% untuk pihak pengelola.”⁷²

Kegiatan ini menggambarkan adanya *Collaborative Governance* adalah kondisi ketika Pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat. *Collaborative Governance* juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan *Collaborative Governance* muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesedian mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain.

⁷¹Wawancara dengan Bapak Edi Sugito Kepala Desa Tanjung Lanjut, 20 Januari 2021

⁷²Wawancara dengan ibu Sumina selaku masyarakat di sekitar Danau Tangkas,

Collaborative Governance merupakan usaha serta respon yang dilakukan Pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi. Dimana dalam penyelesaian masalah publik ini Pemerintah harus melakukan kerjasama dengan aktor non Pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat dan lain-lain.

Wawancara dengan bapak Jafar selaku manajer pengelola wisata Danau

Tangkas beliau mengatakan:

“Kami dari pihak pengelola dan Pemerintah Desa juga mengajak masyarakat yang tidak ikut mengelola wisata danau tangkas untuk ikut bermitra dalam bentuk investasi agar dapat membantu Pemerintah mengelola mengembangkan wisata Danau Tangkas ini, investasi ini masyarakat bisa meletakkan atau berkontribusi untuk melengkapi kebutuhan pengunjung yang tidak disediakan oleh pihak pengelola wisata Danau Tangkas, investasi yang dimaksud berupa investasi perahu sampan, pada investasi ini pola bagi hasilnya 50% untuk pihak mitra dan 50% untuk pihak pengelola, investasi tenda camping dengan sistem bagi hasil 75% untuk pihak mitra dan 25% pihak pengelola, dan usaha jasa sewa tikar dengan sistem bagi hasil 70% untuk pihak mitra dan 30% untuk pihak pengelola wisata Danau Tangkas. Tapi sayangnya kami telah mengajak masyarakat untuk melakukan kerjasama namun partisipasi masyarakat masih kurang untuk melakukan kerjasama ini, untuk sekarang hanya ada 15 masyarakat yang melakukan kerjasama ini dari 15 orang yang melakukan kerjasama ini hanya 5 masyarakat yang diluar pengurus dan anggota wisata selebihnya merupakan anggota bumdes dan pengelola yang juga melakukan investasi penanaman modal di Danau Tangkas ini⁷³

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas terdapat kemitraan atau kerjasama antara Pemerintah Desa dan masyarakat dengan konsep masyarakat diikuti sertakan menjadi anggota Badan Usaha Milik Desa (*Bumdes*) dalam pengelolaan dan terjalinnya kemitraan dan kerjasama investasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

⁷³Wawancara dengan Bapak Jafar, Manager pengelola wisata Danau Tangkas 20 Januari 2021.



pengunjung yang tidak disediakan dari pihak pengelola wisata dengan sistem kerjasama bagi hasil yang telah ditentukan.

Kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan masyarakat memiliki prinsip nilai tolong menolong (kerjasama persatuan dan solidaritas) nilai-nilai ini diwujudkan dengan aksi bersama, kerjasama dan solidaritas sebagai bentuk kerjasama dalam membantu mengembangkan dan mengelola wisata yang dapat memajukan wisata Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lanjut.

Kemitraan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas juga menerapkan gaya kemitraan mutualisme yang didalamnya terdapat aspek penting yaitu saling memberikan manfaat dan saling menguntungkan antara pihak bermitra sehingga dapat mencapai yang diinginkan. Selama kerjasama ini berlangsung pihak-pihak yang melakukan kemitraan bertanggungjawab atas objek yang di investasikan, ketertiban, kebersihan serta keamanan dengan saling berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam kerjasama. Tujuan atau sasaran kerjasama ini berlangsung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pengunjung wisata Danau Tangkas. Dengan mematuhi ketentuan dalam bermitra antara Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga meningkatnya pendapatan asli Desa dan tingkat perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata Danau Tangkas.

Namun pada kenyataannya setelah melakukan wawancara dan observasi langsung yang penulis lakukan masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjalin kemitraan atau kerjasama dalam pengelolaan wisata alam Danau



Tangkas. Sementara masyarakat yang tidak bergabung dalam keanggotaan BUMDes unit pariwisata dan tidak ikut dalam investasi terlihat dalam penelitian ini tidak memiliki peran aktif serta partisipasinya dalam pengembangan dan pengelolaan wisata Danau Tangkas, ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan.⁷⁴ Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 tentang pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata menjelaskan bahwa masyarakat harus berperan aktif, karena partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan pariwisata yang diiringi dengan kebijakannya, maka tugas masyarakat adalah mendukung dalam berbagai program pariwisata yang telah direncanakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan daya tarik sektor pariwisata.

C. Kendala Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas

Dari hasil penelitian wawancara dan observasi mengatakan Pemerintah Desa Tanjung Lanjut memaparkan beberapa kendala dalam kerjama dalam Pengelolaan Wisata Danau Tangkas, dimana kendala merupakan halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran yang diinginkan. Kendala yang dihadapi Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas:

⁷⁴Observasi, Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Kemitraan Pengelolaan Wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi, 20 Januari 2021



1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak disuatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain.

Sumber Daya Manusiasangat berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (*people*) berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja. Pada beberapa industri, faktor manusia berperan penting dan menjadi kunci terhadap keberhasilan yang ingin dicapai. Seperti industri pariwisata, dimana pengelola wisata memiliki hubungan langsung yang bersifat *intangibile* (tak berwujud) dengan pengunjung yang sangat bergantung pada kemampuan individu dalam membangkitkan minat dan menciptakan kenyamanan dan kesenangan terhadap pengunjung wisatanya.⁷⁵ Dalam hal ini sumber daya manusia yang baik pada adalah manusia-manusia yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang baik dan mampu menunjang pencapaian sasaran dan bidang tugas dalam suatu organisasi.

⁷⁵ Setiawan, Rony Ika. "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata": *Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang, Jurnal Penataran*. Vol. 1 No.1. 2016



- b. Memiliki sifat disiplin dalam kerja, berdedikasi serta loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan organisasi.
- c. Memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dan pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap tugas dan kewajibannya sebagai karyawan atau unsur manajemen organisasi.
- d. Memiliki kemauan yang kuat untuk berprestasi produktif dan bersikap profesional.
- e. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan potensi dan kemampuan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
- f. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang tehnik maupun manajemen dan kepemimpinan.
- g. Memiliki keahlian dan ketrampilan yang tertinggi dalam bidang tugas dan memiliki kemampuan alih teknologi.
- h. Memiliki jiwa kewirausahaan (*enterpreneurship*) yang tinggi dan konsisten
- i. Memiliki pola pikir dan pola tindak yang sesuai dengan visi, misi, dan budaya kerja organisasi.⁷⁶

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan Bapak Edi Sugito bahwa dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas memiliki kendala dalam sumber daya manusia, sangat perlu dibutuhkannya lagi pengembangan untuk sumber daya manusia untuk lebih memahami dari segi aspek sikap dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam Danau Tangkas dan akan terpenuhinya kebutuhan pengunjung dari segi pengetahuan

⁷⁶ Nandi. 2008. "Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia". Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi. Vol. 8 No. 1 April 2008.



tentang sejarah, pelayanan yang terbaik serta kenyamanan sehingga wisatawan akan terus kembali berkunjung ke wisata Danau Tangkas.⁷⁷

Dalam hal ini Pemerintah Desa terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya dengan mengikut sertakan pengelola wisata untuk ikut dalam pelatihan-pelatihan, sosialisasi yang diberikan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata. Karna Pemerintah Desa mengetahui betul sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting terhadap mengatasi hambatan dan kendala pada pengelolaan wisata Danau Tangkas yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi . Oleh karena itu, Manajemen sumber daya manusia merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, mengelola memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya.

2. Perencanaan

Dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata danau Danau Tangkas memiliki perencanaan. Maka dalam Pariwisata sangat dibutuhkan perencanaan untuk mengembangkan dan mengelola suatu Objek wisata. Dalam melaksanakan dan mewujudkan perencanaan tersebut selain dibutuhkan dukungan dari Pemerintah dan masyarakat selain itu juga dibutuhkan pendanaan untuk pengembangan dan pengelolaan serta menjalankan rencana yang telah dibuat. Di sampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Lanjut, dalam mengembangkan dan mengelola objek wisata Danau Tangkas mengalami kendala pada pendanaan:

⁷⁷Observasi dan wawancara penulis dengan Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut, 20 Januari 2021



Wawancara dengan bapak Edi sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut:

“Tentu kami mengalami kendala dalam pendanaan, karena selama ini modal dari wisata danau ini melalui bumdes yang ini sepenuhnya dari Pemerintah Desa yang merupakan aset Desa tetapi terpisah, yang merupakan sama-sama aset Desa namun pengelolaannya terpisah antara Pemerintah Desa dan Bumdes. Sedangkan anggaran yang boleh masuk dalam bumdes ini satu-satunya adalah dana Desa, dana Desa pun hanya 750.000.000.00 pertahun, jadi dari dana tersebut harus dibagi-bagi lagi tidak hanya untuk pariwisata, dana tersebut dibagi ke pendidikan, infrastruktur, masalah kesehatan masyarakat serta dana untuk bumdes dari dana tersebut, pembagian anggaran agar semua bisa berjalan yang mengakibatkan keterlambatan pada pengembangan Danau Tangkas.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara faktor yang sangat mempengaruhi sekali dalam pengelolaan objek wisata ialah keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pengelola dan Pemerintah Desa Tanjung Lanjut. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi. Maka dari itu dalam pengelolaan objek wisata dana menjadi faktor utama untuk mengembangkan objek wisata tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Lanjut dan pengelola objek wisata Danau Tangkas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan objek wisata Danau Tangkas terkendala karena keterbatasan dana. Oleh sebab itu pembangunan objek wisata Danau Tangkas menjadi tidak efektif, sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan objek wisata itu sendiri. Dari hal ini Pemerintah mengharapkan kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat menjalin kemitraan untuk membantu pengembangan wisata melalui kemitraan berinvestasi di wisata

⁷⁸Wawancara penulis dengan Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut, 20 Agustus 2021.



alam Danau Tangkas karna Pemerintah Desa tidak menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan pariwisata yang diiringi dengan kebijakannya, maka tugas masyarakat adalah mendukung dalam berbagai program pariwisata yang telah direncanakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan daya tarik sektor pariwisata.

Wawancara penulis dengan bapak Markani selaku masyarakat Desa Tanjung Lanjut:

“Memang ada ajakan dari Pemerintah Desa untuk mengelola wisata dan mengajak untuk berinvestasi untuk tahun depan katanya masing-masing perwakilan Rt, tapi untuk melakukan investasi sekarang rasanya belumlah karna wisatanya belum terlalu berkembang”⁷⁹

Wawancara bersama Kepala Desa Tanjung Lanjut, Edi Sugito mengatakan:

“Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pariwisata Danau Tangkas adalah salahsatu permasalahannya yaitu kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat Desa untuk ikut serta mengelola wisata ini padahal kami dari Pemerintah Desa meberikan harapan tinggi untuk masyarakat untuk menjalin kerjasama, pada awalnya banyak masyarakat yang ingin ikut namun ketika ditengah perjalanan banyak masyarakat yang pesimis karna kondisi danau dan banyaknya cacian hinaan dari masyarakat yang mengakibatkan banyaknya masyarakat tidak lagi ingin berkerja sama dalam pengelolaan pariwisata Danau Tangkas. Sampai saat ini masih kurangnya Partisipasi masyarakat lain untuk gotong royong selain karyawan BUMDES itu sendiri, karna masyarakat disini berfikir inikan pengelolaan dari bumdes berfikir ada uangnya jadi mereka acuh”⁸⁰

⁷⁹Wawancara penulis dengan bapak Markani selaku masyarakat Desa Tanjung Lanjut, 20 Januari 2021

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut, 20 Januari 2021





Wawancara dengan bapak Jafar selaku Meneger wisata Danau Tangkas beliau mengatakan:

“Kendala lain yang kami hadapi kurangnya partisipasi masyarakat untuk diajak bermitra dalam bidang investasi atau penanaman modal, untuk saat ini saja hanya 15 masyarkat yang melakukan investasi pada wisata alam Danau Tangkas, dari 15 orang tersebut, 10 orang merupakan kami pihak pengurus pengelola wisata yang juga melakukan investasi pada wisata Danau Tangkas ini yang berarti hanya 5 masyarakat luar dari pengurus bumdes bagian wisata ”⁸¹

Terkait penjelasan dari poin-poin diatas yang diberikan oleh masyarakat, Kepala DesaTanjung Lanjut dan manager pengelola wisata Danau Tangkas, mengenai kendala-kendala dapat disimpulkan bawah kendala yang dialami dalam menjalankan kerjasama dalam penegelolaan wisata Danau Tangkas yaitu kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat karna beranggapan bahwa wisata Danau Tangkas ini belum berkembang untuk menjalin kemitraan atau kerjasama dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas. Maka diperlukanya peran aktif PemerintahDesa agar masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut serta berkerjasama dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas, karna dengan masyarakat berperan aktif akan memberikan dampak pada perkembangan wisata dan perekonomian masyarakat DesaTanjung Lanjut. Dari kendala yang dialami Pemerintah dan masyarakat dalam menjalin kerjasama ini Pemerintah Desa telah berupaya berkomunikasi dan bermusyawarah untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan pariwisata.

4. Lahan dikawasan wisata

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Jafar selaku Maneger Wisata Danau Tangkas, 20 Januari 2021

Wawancara dengan bapak Japar selaku Manager beliau mengatakan kendala lainnya yang dihadapi dalam kerjasama dengan masyarakat adalah sistem pembagian lahan parkir, beliau mengatakan:

“Kami juga mengalami permasalahan dengan masyarakat sekitar, terutama dengan masyarakat sekitar yang dilintasi jalur wisatawan, dimana ketika wisatawan ramai mengunjungi wisata Danau Tangkas ini otomatis lahan parkir yang kami miliki penuh tidak dapat menampung dari kendaraan para pengunjung. Kendaraan pengunjung ini kami alihkan ke area rumah warga, dengan kami alihkan kerumah warga ini kami memiliki sistem bagi, jika memang dikawasan parkit wisata sistem bagianya pemilik lahan mendapat bagian 20%, berbeda jika untuk parkir diluar kawasan wisata yaitu rumah warga. Sistem baginya menurut aturan Pemerintah Desa itu dibagi-bagi, kalo untuk parkir Rp.5000 maka sistem baginya 2.500 untuk pemilik lahan dan 2.500 untuk pihak pengelola wisata. Namun masalah muncul ketika masyarakat menganggap pembagian ini terlalu kecil dan meminta penuh tidak ada pembagian atas parkir ini, hal ini menjadi permasalahan kerjasama kami dari pihak pengelola dengan masyarakat sekitar”⁸²

Dalam hal ini terjadi gesekan antara pengelola wisata dengan masyarakat terkait dengan lahan wisata. Observasi penulis terhadap lahan wisata ini seperti permasalahan parkir bahwa memang sebetulnya lokasi wisata ini berada di pemukiman warga, ketika objek wisatainya banyak dikunjungi pengunjung sehingga lahan parkir ini membutuhkan lahan yang lebih luas dengan kawasan rumah warga, terjadi gesekan dengan masyarakat dimana masyarakat tidak mau adanya pembagian dari hasil parkir ini, seharusnya ada pembagian hasil menurut peraturan Kepala Desa mengenai pembagian hasil.

Menganai permasalahan lahan ini Pemerintah Desa sudah mulai mengatasinya namun masih dalam proses dengan cara masyarakat diberi kesempatan untuk mengadukan keluhannya kepada lembaga adat Desa terlebih

⁸²Wawancara dengan Bapak Japar selaku Manager Pengelola Wisata Danau Tangkas, 20 Januari 2021

dahulu mengenai lahan parkir ini untuk menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang baik agar tidak merugikan dari berbagai pihak baik itu masyarakat maupun pengelola wisata.

5. Gaji untuk pengelola

Wawancara dengan bapak Jafar selaku Manager dari pengelola wisata danau tangkas:

“Kami selaku pengelola mengalami kendala dalam penggajian untuk masyarakat yang berkerja di wisata Danau Tangkas ini dimana, gaji untuk menggaji karyawan tidak seimbang dengan pendapatan atau tidak balance. Dimana setiap hari ada 20 orang masyarakat yang kerja, semisal pendapatan hanya 500.000.00, pendapatan ini dibagi menjadi dua, satu bagian untuk biaya oprasional dan bagian lainnya dibagi untuk gaji masyarakat yang berkerja, dalam pembagian ini masyarakat yang berkerja banyak yang mengeluh tentang gaji mereka yang mengakibatkan sepi banyak masyarakat yang tidak berkerja. Setelah itu hanya 5 orang masyarakat yang berkerja, pendapatan di wisata mendapatkan pendapatan 1.000.000.00 dibagi dua dengan biaya oprasional dan untuk gaji mereka mendapatkan gaji 100.000.00perhari, yang menyebabkan timbul rasa iri yang muncul terhadap sesama masyarakat yang berkerja di wisata alam Danau Tangkas ini.”⁸³

Dari wawancara penulis mengenai kendala dalam penggajian untuk masyarakat yang ikut sera dalam pengurus wisata dapat disimpulkan bahwa mengalami kendala dikarenakan tidak tercakupnya gaji untuk masyarakat yang berkerja di wisata Danau Tangkas yang dikarenakan pendapatan tidak seimbang. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Desa berupaya membagi sip kerja kepada masyarakat yang berkerja di wisata ini agar tercukupinya anggaran untuk menggaji masyarakat yang berkerja dengan sistem pembagian kerja dimana dihari biasa hanya sekitar 5 sampai 6 masyarakat yang berkerja sedangkan dihari libur seluruh

⁸³Wawancara dengan bapak Jafar, Manager Wisata Danau Tangkas ,20 Januari 2021



masyarakat yang tergabung dalam pengurus wisata boleh berkerja, hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa kecemburuan sosial yang terjadi antar sesama pengurus wisata.

6. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, merupakan peralatan yang dibangun yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastruktur sebagai fasilitas fisik yang dikembangkan oleh badan Pemerintah .

Selain itu infrastruktur merupakan fasilitas umum, baik infrastruktur yang didanai Pemerintah maupun swasta yang menyediakan pelayananguna mendukung dan untuk mencapai standar kehidupan. Dalam konteks perencanaan infrastruktur mengacu pada segala bentuk kontruksi seperti jalan yang merupakan kebutuhan dasar untuk menunjang pembanguna seperti perkotaan, industri serta pariwisata.

Wawancara dengan bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut beliau mengatakan kendala yang dihadapi dalam infrastruktur:

“Permasalahn kita mungkin bukan dalam lingkup namun penunjang dari dari keberhasilan pengembangan dan pengelolaan wisata namun dalam pembangunan atau akses, akses menuju tempat wisata ini menjadi masalah juga dalam pengelolaan, kenapa kami menyebutnya menjadi masalah, karna banyak wisatawan yang komplek mengenai jalannya jelek, apalagi hari ujan jalnnya licin, sebagaimana kita tahu baik jalan menuju Desa maupun jalan menuju wisata alam Danau Tangkas ini masih tanah merah, masih banyak jalan yang belum aspal maupun rangkap beton .”⁸⁴

⁸⁴Wawancara dengan bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut, 20 Januari 2021



Seperti yang telah dijelaskan Kepala Desa Tanjung Lanjut mengenai infrastruktur atau akses jalan menuju wisata Danau Tangkas ini dimana infrastruktur merupakan aspek penting sebagai elemen dasar dalam sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam sektor pariwisata sangat terkait dan tergantung pada infrastruktur. Peran infrastruktur menjadi sangat penting karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia, yang dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Berdasarkan wawancara dan observasi langsung yang penulis lakukan terhadap infrastruktur jalan menuju Desa Tanjung Lanjut maupun menuju objek wisata Danau Tangkas infrastruktur jalan masih kurang baik. Ini ditandai dengan banyaknya jalan rusak, berlubang hal ini dikarenakan infrastruktur jalan menuju wisata masih berupa jalan tanah biasa, belum adanya pengerasan jalan menuju objek wisata Danau Tangkas. Pemerintah Desa Tanjung Lanjut terus berupaya berkerjasama dengan Pemerintah Daerah guna memperbaiki infrastruktur menuju kawasan wisata Danau Tangkas ini.

Pasalnya, infrastruktur akan sangat mempermudah perjalanan wisata, karena perjalanan wisata berkaitan dengan pergerakan wisatawan untuk menuju objek wisata. Dengan infrastruktur yang baik akan akan berdampak baik kepada perkembangan pariwisata yang dapat mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Lanjut bukan hanya masyarakat Desa



Tanjung masyarakat Desa tetanggapun akan mendapatkan keuntungan jika infrastruktur berupa jalan ini sudah membaik⁸⁵.

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

⁸⁵Observasi, Terhadap Infrastruktur menuju obyek wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi, 20 Januari 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan penelitian tentang kemitraan Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut kabupaten muaro jambi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan wisata Danau Tangkas di Desa Tanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Lanjut dengan pengembangan pariwisata melalui Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa Tanjung Jaya Mandiri, yaitu dengan manajemen perencanaan pengembangan wisata, pengorganisasian dengan pembentukan struktur dan pembagian tugas kerja dari pengurus, pengawasan dan koordinasi dengan melibatkan masyarakat didalamnya.
2. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas dilaksanakan dengan konsep masyarakat diikutsertakan menjadi anggota Badan Usaha Milik Desa (*Bumdes*) dalam pengelolaan dan terjalannya kemitraan dan kerjasama investasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengunjung yang tidak disediakan dari pihak pengelola wisata dengan sistem kerjasama bagi hasil yang telah ditentukan. gaya kemitraan yang digunakan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menjalankan kemitraan menggunakan model multualisme yang didalamnya



terdapat aspek penting yaitu saling memberikan manfaat dan saling menguntungkan antara pihak yang bermitra. Namun ditemukan kenyataan bahwa masyarakat yang tidak bergabung dalam keanggotaan BUMDes unit pariwisata dan tidak ikut dalam investasi sangat tidak ditemukan partisipasinya dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas.

3. Kendala dari Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas di DesaTanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi adalah masalah sumberdaya manusia, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjalin kemitraan, kurangnya modal, kendala dengan masyarakat mengenai lahan parkir, selain itu adanya kendala terkait infrastruktur jalan menuju DesaTanjung Lanjut dan objek wisata Danau Tangkas.

B. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar kemitraan antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata di DesaTanjung Lanjut Kabupaten Muaro Jambi Provinsi berjalan lebih baik dari sebelumnya, maka sebaiknya: Meningkatkan sumber daya manusia dan tenaga ahli bidang pariwisata di DesaTanjung Lanjut agar dapat berkembang dengan maksimal .
2. Pemerintah DesaTanjung Lanjut harus giat lagi dan fokus untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Tangkas ini. dan sebaiknya Pemerintah Desa juga menjalalankan kerjasama dengan pihak swasta agar pengembangan pariwisata dapat terlaksana dengan cepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

3. Meningkatkan fasilitas aksesibilitas seperti jalan di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata termasuk daerah yang sulit dijangkau dan menyediakan serta menambah wahana baru di wisata Danau Tangkas.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media. Yogyakarta. 2004.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008).
- Dr. DRs. I Wayan suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Social, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung, Nilacakra: 2018) .
- Endang Tjitroesmi, *Peran Industri Kepariwisata dalam Perekonomian Nasional dan Daerah P2E-LIPI*, Jakarta, 2003.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009)
- Gde Pita dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Unit Press, 1995)
- Hidayat S, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Prilaku Elit Lokal, tulisan dalam Buku "Indonesia Menapak Abad 21"*, Kajian Ekonomi Politik, Mellennium Publisher, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

- Maria Eni Sarasih, *Pemerintah Desa dan Implementasi*, (Jakarta, Erlangga, 2006).
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009)
- Muhammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000,
- Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), Jambi: Syari'ah Press, 2014
- Suharsimi arikunta, *Pengelolaan kelas dan siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988).
- Zeanuri Muchamad, *Kemitraan Pengelolaan Pariwisata*, Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Abdullah Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Kebijakan Publik*, Jurnal Publik.
- Arisman, *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Sipin Guns Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi , Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN JAMBI, 2019
- Kurniawan Ade Az, *Upaya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Jambi Dalam Mengoptimalkan Objek Wisata*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN STS JAMBI. 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Aidul Adhan, *Peran Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pengembangan objek wisata Candi Muaro Jambi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, UIN STS JAMBI.2020
Dokumentasi BUMDes Tajam 2019
Dokumentasi Kantor desa Tanjung Lanjut tahun 2019.
RPJMDes desa Tanjung Lanjut tahun 2019-2025

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009. Tentang Pariwisata.

C. Sumber Lainnya

Tri Widodo W. Utomo, Materi Diklat Manajemen Pemerintahan : Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah. LAN RI,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Responden Sumber Data

No	Nama Responden	Jabatan
1	Edi Sugito	Kepala Desa Tanjung Lanjut
2	Arifin, SE	Direktur BUMDes TAJAM
3	Japar	Manager pengelola wisata
4	Sumina	Masyarakat
5	Markani	Masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

DOKUMENTASI



Kantor Desa Tanjung Lanjut

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



**Wawancara dengan Bapak Edi Sugito selaku Kepala Desa Tanjung Lanjut
dan juga selaku Komisaris Pengelola Wisata Danau Tangkas**

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Wawancara dengan Arifin SE, selaku Direktur BUMDes Tajam



Wawancara dengan bapak Japar selaku Manager Wisata Danau Tangkas

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Wawancara dengan Bapak Markani selaku masyarakat Desa Tanjung

Lanjut



Wawancara dengan Ibu Sumina selaku masyarakat Desa Tanjung Lanjut

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Objek Wisata Danau Alam Tangkas



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ani Julia Safitri
Nim : 105170394
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Bukit Baling, 07 Juli 1999
Alamat : Rt.01 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi
Nama Ayah : Anwar Fauzi
Nama Ibu : Sawi Atun



B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI Tahun Lulus : SD Negeri 132/IX Bukit Baling, 2011
2. SMP/MTS Tahun Lulus : SMP Negeri 6 Muaro Jambi, 2014
3. SMA/MA Tahun Lulus : SMA Negeri 2 Muaro Jambi, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi